
**TINJAUAN PERENCANAAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
DAN REALISASINYA**

D R A F T I

**Oleh :
Kelompok II**

**M. Yus Iqbal
Eny Sulistiowati
Ikawati
Martiasih Nursanti**

BAGIAN ANALISA PENDAPATAN NEGARA DAN BELANJA NEGARA

MEI 2008

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak ini merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang pada masa mendatang diharapkan kontribusinya semakin meningkat agar tercapai kemandirian dalam pembiayaan negara.

Komponen perpajakan merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara. Dalam tigatahun terakhir total penerimaan perpajakan menyumbang rata-rata 68,6% dari total penerimaan negara. Adapun komponen terbesar dalam total penerimaan perpajakan berasal dari pajak dalam negeri atau 66,0% selebihnya berasal dari pajak perdagangan internasional.

Secara nominal dalam dua tahun terakhir penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam tahun 2005, total penerimaan perpajakan mencapai Rp347,0 triliun, dalam tahun 2006 meningkat menjadi 409,2 triliun atau meningkat sebesar 17,9%. Dalam tahun 2007 penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai sebesar Rp489,9 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 19,7%. Namun pencapaian atau realisasi penerimaan perpajakan tersebut masih dibawah target yang ditetapkan dalam APBN.

Walaupun secara nominal penerimaan perpajakan mengalami peningkatan namun tax ratio nya justru mengalami penurunan. Berdasarkan PDB dengan basis cakupan perhitungan tahun 2000, tax ratio tahun 2005 mencapai 12,3% sedangkan dalam tahun 2006 menurun menjadi 12,3%. Begitu pula apabila *tax ratio* dihitung dengan basis cakupan tahun sebelumnya tetap mengalami penurunan yaitu 13,7% pada tahun 2005 menjadi 13,5% pada tahun 2006.

Seberapa besar target penerimaan perpajakan setiap tahun yang mampu dihimpun oleh pemerintah ditetapkan dalam UU APBN. Namun, berbeda dengan yang selama ini terjadi, akhir-akhir ini realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah dari yang ditargetkan dalam APBN. Tinggi rendahnya realisasi penerimaan perpajakan tergantung pada kondisi perekonomian makro. Beberapa indikator kondisi perekonomian makro yang selalu diperhitungkan dan menjadi dasar dalam perhitungan potensi penerimaan pajak yaitu tingkat suku bunga SBI , nilai tukar rupiah per US dollar dan tingkat inflasi.

Seberapa besar target penerimaan perpajakan setiap tahun yang mampu dihimpun oleh pemerintah ditetapkan dalam UU APBN. Namun, berbeda dengan yang selama ini terjadi, akhir-akhir ini realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah dari yang ditargetkan dalam APBN. Tinggi rendahnya realisasi penerimaan perpajakan tergantung pada kondisi perekonomian makro. Beberapa indikator kondisi perekonomian makro yang selalu diperhitungkan dan menjadi dasar dalam perhitungan potensi penerimaan pajak yaitu tingkat suku bunga SBI , nilai tukar rupiah per US dollar dan tingkat inflasi.

Pertanyaan permasalahan :

1. Bagaimana perencanaan penerimaan perpajakan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan perpajakan?
3. **Bagaimana gambaran umum pencapaian penerimaan perpajakan selama ini?**
4. **Bagaimana ukuran kinerja perpajakan ?**

1.2. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum penerimaan perpajakan dan indikator ekonomi makro yang mempengaruhinya, mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan.

1.3. Metode Penulisan

Untuk melihat perkembangan penerimaan perpajakan beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya digunakan analisa deskriptif dan analisa regresi dan korelasi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Departemen Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Data yang digunakan merupakan data tahunan dari tahun- 2006 dan sifatnya sudah dipublish.

1.4. Waktu Penulisan

No	Keterangan	Waktu		
		April	Mei	Juni
1.	Persiapan <i>On The Job Training</i>			
2.	Pembentukan kelompok dan pemilihan topik penulisan			
3.	Pembuatan proposal dan outline penulisan			
4.	Pengumpulan dan pengolahan data			
5.	Pembuatan draft laporan			
6.	Penyempurnaan laporan			
7.	Penyerahan laporan final			

II. LANDASAN TEORI

- 2.1. **Pengertian dan Fungsi Pajak**
- 2.2. **Perencanaan Penerimaan Perpajakan**
- 2.3. **Indikator Perhitungan Penerimaan Perpajakan**

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Pajak dapat dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat dapat dibagi atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas Surat Ketetapan Pajak dan pengenaannya dilakukan secara berkala tiap tahun. Pajak tak langsung adalah pajak yang pungutannya dilakukan tidak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, contoh : pajak penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Kapasitas Pajak

Besarnya kapasitas pajak tergantung pada basis pajak di suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat semakin besar pula kapasitas pajak. Hal ini tercermin dari PDB secara nasional dan PDRB regional. Yang disebut denganka[pasitas pajak hádala besarnya tarif yang dikalikan dengan basis atau jumlah objek yang dikenakan pajak. Pengenaan tarif pajak disesuaikan dengan prinsip keadilan dan daya pikul masyarakat. Sedangkan basis pajak sangat tergantung kepada kegiatan ekonomi dan peraturan pajak masing-masing daerah. Basis pajak adalah objek dan subjek pajak badan usaha atau individu yang didasarkan pungutannya pada undang – undang perpajakan baik yang dikeluarkan oleh pusat maupun undang-undang perpajakan daerah.

Tax Effort

Besarnya penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam suatu daerah sangat tergantung lepada kemampuan pemerintah mengumpulkannya. Kemampuan tersebut harus didukung kemmpauan aparat fiskus yang baik dan kesadaran wajib pajak. Capacitas pajak di statu daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$T_{cj} = T_s B_j$$

dimana :

$$\begin{aligned} T_{cj} &= \text{Capacitas pajak di daerah } j \\ T_s &= \text{Estándar Tarif Pajak} \\ B_j &= \text{Basis pajak di daerah } j \end{aligned}$$

Upaya pajak (tax effort) dapat digunakan untuk menganalisis posisi fiskal di statu daerah yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap kapasitas pajak. Dengan demikian posisi fiskal adalah sama dengan upaya pengumpulan pajak. Upaya pengumpulan pajak (tax effort) dirumuskan sebagai berikut :

$$T_{ej} = T_{tj} / t_s B_j = T_{tj} / t_{ej}$$

$$\text{Dimana} = T_{ej} = \text{Upaya pengumpulan pajak di daerah } j$$

$T_{tj} =$ Penerimaan pajak di daerah j

Nilai T_e yang akan diperoleh berkisar antara 0 – 1. Bila T_e mendekati 1 maka dapat dikatakan posisi fiskal kuat dan bila mendekati 0 posisi fiskal lemah.

Elastisitas Pajak

Untuk melihat kepekaan penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak terhadap perubahan pendapatan nasional/daerah digunakan konsep mikro ekonomi yaitu elastisitas.

III. ANALISIS

**3.1. PERENCANAAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DI INDONESIA
..... fiskal depkeu....**

3.2. TINJAUAN REALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN

Selama lebih dari satu dasawarsa penerimaan perpajakan menjadi sumber utama pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penerimaan perpajakan yang mencapai lebih dari 60% dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Persentase penerimaan perpajakan pun senantiasa berfluktuasi namun demikian penerimaan perpajakan tetap mendominasi pendapatan negara.

Antara kurun waktu 1994-2006 rata-rata penerimaan perpajakan adalah 60%an . Semenjak tahun 2007 penerimaan perpajakan telah mencapai 70% dari pendapatan negara.

Adapun besaran penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sepanjang tahun 1994 – 2008 dapat dilihat pada tabel 1.

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN – SEMEN DPMPT

Tabel 1
PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1994/1995-2008 *)
(dalam miliar rupiah)

3.2.1 P e n e r i m a n P e r j e n i s P a j a k	Tahun Anggaran	Perpajakan ¹⁾		Bukan Pajak ²⁾		Jumlah	
	(1)	Nilai (2)	(%) (3)	Nilai (4)	(%) (5)	Nilai (6)	(%) (7)
	1994/1995	44.442,1	66,9	21.975,9	33,1	66.418,0	100,0
	1995/1996	48.686,3	66,7	24.927,6	33,3	73.013,9	100,0
	1996/1997	57.339,9	65,4	30.290,4	34,6	87.630,3	100,0
	1997/1998	70.934,2	63,2	41.341,3	36,8	112.275,5	100,0
	1998/1999	102.394,2	64,8	55.648,0	35,2	158.042,5	100,0
	1999/2000 ³⁾	125.951,0	61,6	78.481,6	38,4	204.432,6	100,0
	2000 ⁴⁾	115.912,5	56,5	89.422,0	43,5	205.334,5	100,0
	2001	185.540,9	61,7	115.058,6	38,3	300.599,5	100,0
	2002	210.087,5	70,4	88.440,0	29,6	298.527,5	100,0
	2003	242.048,1	71,0	98.880,2	29,0	340.928,3	100,0
	2004	280.558,8	69,6	122.545,8	30,4	403.104,6	100,0
	2005	347.031,1	70,3	146.888,3	29,0	493.919,4	100,0
	2006	409.203,0	64,3	226.950,1	30,4	636.153,1	100,0
	(LKPP)						
	2007	509.462,0	70,7	210.927,0	29,3	720.398,0	100,0
	(APBN UU.18/2006)						
	2007	489.891,8	71,9	191.868,2	28,1	681.760,1	100,0
	(RAPBN-P)						
	2007	492.010,9	71,3	198.253,7	28,7	690.264,6	100,0
	(APBN-P)						
	2008	583.675,6	76,9	175.649,1	23,1	759.324,7	100,0
	(RAPBN)						
	2008	591.978,4	76,0	187.236,1	24,0	779.214,5	100,0
	(APBN)						

*) Perbedaan satu angka dibelakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

1) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas tetapi tidak termasuk pajak daerah dan retribusi daerah

2) Sejak TA 1999/2000 tidak termasuk PPh Migas dan Privatisasi

3) Disesuaikan dengan klasifikasi baru

4) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan)

PENERIMAAN PERPAJAKAN, 1994/1995-2008 *)
(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Pajak Dalam Negeri					Pajak Perdagangan Internasional		Jumlah	P D B ³⁾	Rasio (%)
	PPh ¹⁾	PPN	PBB ²⁾	Cukai	Pajak Lainnya	Bea Masuk	Pajak Ekspor/ Bea Keluar			
1994/1995	18.764,1	16.544,8	1.647,3	3.153,3	301,9	3.900,1	130,6	44.442,1	365.750,9	12,2
1995/1996	21.012,0	18.519,4	1.893,9	3.592,7	452,8	3.029,4	186,1	48.686,3	433.110,4	11,2
1996/1997	27.062,1	20.351,2	2.413,2	4.262,8	590,7	2.578,9	81,0	57.339,9	511.365,4	11,2
1997/1998	34.388,3	25.198,8	2.640,9	5.101,2	477,8	2.998,7	128,5	70.934,2	633.520,5	11,2
1998/1999	55.944,3	27.803,2	3.565,3	7.732,9	413,0	2.305,6	4.630,2	102.394,4	947.659,8	10,8
1999/2000 ³⁾	72.729,0	33.087,0	4.107,3	10.381,2	610,9	4.177,0	858,6	125.951,0	1.138.115,8	11,1
2000 ⁴⁾	57.073,0	35.231,8	4.456,1	11.286,6	836,7	6.697,1	331,2	115.912,5	971.502,6	11,9
2001 ⁵⁾	94.576,0	55.957,0	6.662,9	17.394,1	1.383,9	9.025,8	541,2	185.540,9	1.684.280,0	11,0
2002	101.873,5	65.153,0	7.827,7	23.188,6	1.469,3	10.344,4	231,0	210.087,5	1.863.275,0	11,3
2003	115.015,6	77.081,5	10.905,3	26.277,2	1.654,3	10.884,6	229,7	242.048,2	2.045.853,0	11,8
2004	119.541,2	102.572,7	14.685,2	29.172,5	1.872,1	12.444,0	297,8	280.558,8	2.303.031,0	12,2
2005	175.541,2	10.123.508,0	19.648,6	33.256,2	2.050,3	14.920,9	318,2	347.031,2	2.784.960,4	12,5
2006	208.833,1	123.035,9	24.043,0	37.772,1	2.287,4	12.140,4	1.091,1	409.203,0	3.338.195,7	12,3
(LKPP)										
2007 (APBN UU.18/2006)	261.698,3	161.044,2	26.656,9	42.034,7	3.157,5	14.417,6	452,8	509.462,0	3.779.154,7	13,5
2007 (RAPBN-P)	249.954,2	152.057,2	25.991,3	42.031,7	2.719,5	14.417,6	2.717,3	489.891,8	3.804.154,7	12,9
2007 (APBN-P)	251.748,3	152.057,2	25.991,3	42.034,7	2.719,5	14.417,6	3.042,3	492.010,9	3.761.412,2	13,1
2008 (RAPBN)	305.262,5	186.626,7	23.012,4	44.426,5	2.944,6	14.940,8	462,0	583.675,6	4.306.607,5	13,6
2008 (APBN)	305.961,4	187.626,7	23.012,4	44.426,5	2.944,6	17.940,8	4.065,9	591.978,4	4.306.607,5	13,7

* Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

1) Sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas

2) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB

3) TA 1989/1990-1998/1999 menggunakan PDB Non Migas sejak TA 1999/2000 menggunakan PDB total

4) Disesuaikan dengan klasifikasi baru

5) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan)

6) sejak tahun 2001 menggunakan PDB baru dengan cakupan (coverage) yang lebih luas

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan penyumbang terbesar penerimaan perpajakan.

3.2.2. Penerimaan Pajak Sektoral

Perkembangan Penerimaan PPh per Sektor, 2005 - 2007
(triliun rupiah)

Sektor Ekonomi	Tahun			Pertumbuhan	
	2005	2006	2007	2006	2007
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,5	2,8	3,2	12,0%	14,3%
Pertambangan Migas	9,9	12,1	13,7	22,2%	13,2%
Pertambangan Bukan Migas	5,6	6,2	7,2	10,7%	16,1%
Penggalian	0,1	0,1	0,2	0,0%	100,0%
Industri Pengolahan	33,7	34,6	44,3	2,7%	28,0%
Listrik, Gas dan Air bersih	3	5,7	6,1	90,0%	7,0%
Konstruksi	2,5	3,1	3,8	24,0%	22,6%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,1	13,5	19,2	21,6%	42,2%
Pengangkutan dan Komunikasi	11,3	14,7	19,8	30,1%	34,7%
Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	35,7	44,3	58,4	24,1%	31,8%
Jasa Lainnya	6,8	7,6	8,5	11,8%	11,8%
Kegiatan yang belum jelas batasannya	53,4	64,1	65,6	20,0%	2,3%
Total	175,6	208,8	250	18,9%	19,7%

Sumber : Departemen Keuangan
) RABPN-P

.....

Perkembangan Penerimaan PPN Dalam Negeri per Sektor, 2005 - 2007
(triliun rupiah)

Sektor Ekonomi	Tahun			Pertumbuhan	
	2005	2006	2007	2006	2007
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,6	1,8	2,0	12,5%	11,1%
Pertambangan Migas	2,9	16,8	28,3	479,3%	68,5%
Pertambangan Bukan Migas	0,7	1,1	1,2	57,1%	9,1%
Penggalian	0,1	0,3	0,4	200,0%	33,3%
Industri Pengolahan	18,5	22,3	25,0	20,5%	12,1%
Listrik, Gas dan Air bersih	0,4	0,6	0,7	50,0%	16,7%
Konstruksi	4,3	6,2	7,2	44,2%	16,1%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,6	12,7	14,1	19,8%	11,0%
Pengangkutan dan Komunikasi	6,1	6,6	7,4	8,2%	12,1%
Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	7,7	8,4	14,1	9,1%	67,9%
Jasa Lainnya	1,3	1,6	1,9	23,1%	18,8%
Kegiatan yang belum jelas batasannya	2	2,4	1,6	20,0%	-33,3%
Total	56,2	80,8	103,9	43,8%	28,6%

Sumber : Departemen Keuangan
) RABPN-P

3.3. INDIKATOR PENERIMAAN PERPAJAKAN

3.3.1. Tax Ratio

Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan jumlah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Menurut Bank dunia, tax ratio untuk negara berkembang sekitar 15 – 20%.

Walaupun secara nominal penerimaan perpajakan mengalami peningkatan namun tax ratio nya justru mengalami penurunan. Berdasarkan PDB dengan basis cakupan perhitungan tahun 2000, tax ratio tahun 2005 mencapai 12,5% sedangkan dalam tahun 2006 menurun menjadi 12,3%. Begitu pula apabila *tax ratio* dihitung dengan basis cakupan tahun sebelumnya tetap mengalami penurunan yaitu 13,7% pada tahun 2005 menjadi 13,5% pada tahun 2006.¹ Di sisi lain bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, tax ratio Indonesia masih rendah. Menurut data ADB, tax ratio Indonesia pada tahun 2002 sebesar 13,1% sementara Malaysia, Thailand dan Vietnam memiliki tax ratio masing-masing sebesar 18,5% , 14,5% dan 15,3%.

Penyebab menurunnya tax ratio secara makro karena meningkatnya penerimaan pajak (dalam persentase) tidak sepadan dengan pertumbuhan PDB. Elastisitas pajak kurang dari 1 sehingga tiap kenaikan 1% PDB menghasilkan penerimaan pajak kurang dari 1%. Discrepancies ini bisa berkepanjangan sehingga tax ratio semakin menurun dari waktu ke waktu. Hal ini mungkin terjadi karena tax handles (instrumen pemungutan dan pemotongan pajak otomatis) kurang bisa bekerja secara baik untuk mengamankan dan menenadalikan kenaikan penerimaan pajak proporsional dengan kenaikan PDB pada sektor-sektor yang sedang *booming*. Kemungkinan lain, pertumbuhan PDB terjadi dari sektor hard- to-tax (sulit memungut pajak) atau dari sektor yang diberikan insentif pajak. Tax ratio sebagai fakta perbandingan antar penerimaan pajak dengan PDB tidak mempengaruhi penerimaan pajak. Justru keberhasilan merealisasikan kenaikan penerimaan pajak dari tiap kenaikan PDB akan mempengaruhi besaran tax ratio. Namun secara psikologis discrepancies tax ratio tiap tahun kalau dipakai sebagai pembenaran kegagalan dapat meningkatkan moral hazard capaian kinerja penerimaan pajak.

Strategi meningkatkan tax ratio adalah bagaimana dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kenaikan penerimaan pajak lebih besar dari kenaikan PDB. Dengan kata lain bahwa tiap peningkatan 1% PDB harus dapat direalisasikan lebih dari 1% peningkatan penerimaan pajak. Strategi dimaksud umumnya dilaksanakan melalui (1) ekstensifikasi berupa bertambah banyaknya jumlah pembayar pajak dan (2) intensifikasi melalui pengawasan pembayaran pajak (terutama pembayaran masa dan angsuran pajak, penagihan atas tunggakan pajak, pemeriksaan untuk meneliti kepatuhan perpajakan, penyidikan dan penegakan hukum lainnya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan serta pelayanan prima untuk memberikan kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan meningkat.

Kelemahannya mungkin terletak pada belum efektifnya strategi dimaksud karena tidak bisa mencakup sektor-sektor yang sedang booming, kurang efektifnya penegakan hukum dan pelayanan karena kurang tepatnya momentum atau tajamnya prioritas, kurangnya intensitas bantuan para pihak (misalnya

¹ Nota Keuangan dan RAPBN 2008

bendaharawan APBN dan APBD), tidak adanya identitas tunggal sehingga sulit melokalisir wajib pajak, lemahnya data perpajakan baik dari Ditjen Pajak maupun para pihak terkait sehingga banyak obyek dan potensi pajak yang belum terjangkau (belum lengkap dan benarnya objek pajak yang dilaporkan) dan kurang efektifnya tindakan pencegahan dan pemberantasan penghindaran dan penggelapan pajak.(Gunadi, 2008)

Tax ratio sebagai ukuran kinerja perpajakan telah lama diungkapkan oleh para ahli ekonomi. Meski demikian, terdapat sejumlah perdebatan mendasar yang mengemuka sehubungan dengan validitas tax ratio ini yaitu :

- masalah penerimaan perpajakan
tidak ada kesepakatan baku mengenai jumlah penerimaan perpajakan yang dijadikan faktor pembilang , apakah hanya merupakan pajak pusat atau melingkupi pajak daerah juga, apakah hanya merupakan pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak atautkah termasuk juga pajak lain yang tidak dikelola oleh Ditjen Pajak, serta apakah hanya merupakan pajak yang diterima utuh oleh Ditjen Pajak atautkah termasuk restitusi dan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah. Jadi, sesungguhnya persoalan besaran tax ratio dapat menjadi uncomparable antar negara, kecuali terdapat lembaga survei tersendiri yang melakukan perhitungan tax ratio secara terintegrasi dengan metodologi yang sama seperti yang dilakukan OECD terhadap negara-negara anggotanya.

Bila mengacu pada perhitungan tax ratio kita, jumlah penerimaan perpajakan yang dijadikan acuan sebagai faktor pembilang tax ratio tidak meliputi pajak daerah, restitusi dan fasilitas perpajakan. Meski demikian bila kita melakukan modifikasi terhadap jumlah penerimaan perpajakan ini tetap saja tax ratio kita masih ketinggalan dibandingkan beberapa negara tetangga dalam kawasan regional tertentu, apalagi bila kita membandingkannya dengan negara maju. Dalam hal ini, persoalan utamanya adalah bagaimana upaya untuk menggenjot penerimaan perpajakan agar tax ratio kita mengalami peningkatan.

- masalah PDB
masalah lain dalam perhitungan tax ratio adalah perdebatan mengenai faktor pembagi dalam formula tax ratio. Yaitu nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka acuan dalam PDB ini sering diperdebatkan karena adanya PDB dengan basis tahun 1993 dan 2000. Berikut adalah perbandingan tax ratio dengan dua versi PDB :

Tahun	Penerimaan Perpajakan (Rp Triliun)	PDB Nominal		Tax Ratio	
		Basis 1993 (Rp Triliun)	Basis 2000 (Rp Triliun)	Basis 1993	Basis 2000
2005	347,0	2.534,8	2.785,0	13,7	12,5
2006	409,2	3.038,0	3.338,2	13,5	12,3
2007	489,9	3.462,3	3.804,2	14,1	12,9

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2008

Selain itu muncul kritik terhadap pemakaian tax ratio sebagai ukuran kinerja perpajakan. Iman Sugema (Bisnis Indonesia, 23 Agustus 2004), misalnya, telah mempertanyakan ukuran keberhasilan ini bila hanya berdasarkan angka penerimaan

pajak karena tak diimbangi dengan pertumbuhan tax ratio yang relatif konstan pada kisaran 13%. Iman Sugema (tempo, 7 September 2004) juga mempertanyakan penerimaan pajak yang tinggi tetapi berasosiasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa selama masa orde baru, tax ratio sebesar 7,4% namun pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1%. Saat pemerintahan Abdurrahman Wahid tax ratio mencapai 10,7% dari PDB dan pertumbuhan ekonomi 4,8%. Pada saat pemerintahan Megawati ketika tax ratio mencapai 13,5% pertumbuhan ekonomi justru turun mencapai 4,2%.

3.3.2. Tax Coverage Ratio

Tax coverage ratio menunjukkan seberapa besar potensi pajak yang dapat direalisasi menjadi penerimaan pajak. Dari sudut pandang tax coverage ratio, kinerja penerimaan pajak Indonesia menunjukkan prestasi yang meningkat. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut :

Perkembangan Tax Coverage Ratio

Tahun	Penerimaan	Potensi	Coverage Ratio
1993/1994	30.470,30	58.426,40	52,15%
1994/1995	37.258,10	69.272,70	53,78%
1995/1996	41.878,10	83.357,50	50,24%
1996/1997	49.826,10	98.757,50	50,45%
1997/1998	62.705,80	117.684,20	53,28%
1998/1999	87.712,30	173.595,20	50,53%
1999/2000	97.408,80	234.155,80	41,60%
2000	97.484,80	145.935,30	66,80%
2001	157.195,90	206.564,90	76,10%
2002	180.099,00	235.731,90	76,40%

Sumber : Ditjen Pajak

4. 3.3.3. Tax Buoyancy

Ukuran lain yang juga dijadikan indikator penilaian kinerja penerimaan pajak adalah tax buoyancy. Tax buoyancy merupakan perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Dengan kata lain buoyancy adalah elastisitas penerimaan perpajakan terhadap PDB yang menunjukkan berapa persen perubahan penerimaan pajak apabila PDB berubah 1 persen. Berikut adalah data tax buoyancy Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lainnya :

Tax Buoyancy pada Beberapa Negara

Negara	Tax Buoyancy
India	2.4
Korea	2.2
Maroko	2.2
Honduras	2.2
Pakistan	2.1
Malaysia	1.9
Indonesia	
Semua Jenis Pajak	1.8

4.1.1. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak

Perkembangan jumlah wajib pajak maupun perkembangan jumlah SPT yang masuk juga dapat menjadi rujukan untuk menilai kinerja penerimaan perpajakan. Sepanjang tahun 2002 – 2007 terdapat penambahan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 3.640.302

Jumlah Wajib Pajak Tahun 2002 - 2007

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006	2007
WP BADAN						
1. Terdaftar	941.038	1.031.624	1.116.224	1.207.653	1.337.637	1.358.022
2. Efektif	795.451 85%	882.253 86%	964.122 86%	1.054.127 87%	1.137.752 85%	1.268.739 93%
WP ORANG PRIBADI						
1. Terdaftar	2.112.896	2.426.110	2.728.947	2.999.109	3.330.821	5.336.214
2. Efektif	1.986.108 94%	2.263.492 93%	2.564.735 94%	2.829.251 94%	2.876.911 86%	5.144.748 96%
TOTAL WP BADAN & OP						
1. Terdaftar	3.053.934	3.457.734	3.845.171	4.206.762	4.668.458	6.694.236
2. Efektif	2.781.559 91%	3.145.745 91%	3.528.857 92%	3.883.378 92%	4.014.663 86%	6.413.487 96%

Sumber : Direktorat TIP (05 Februari 2008)

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT

Tahun Pajak	SPT Dikirim			SPT Masuk			% SPT Masuk	
	Badan	OP	Jumlah	Badan	OP	Jumlah	Badan	OP
1996	492.442	1.158.280	1.650.722	215.014	522.883	737.897	43,66%	45,14%
1997	536.013	1.226.509	1.762.522	221.528	510.322	731.850	41,33%	41,61%
1998	573.456	1.267.841	1.841.297	219.543	475.473	695.016	38,28%	37,50%
1999	640.910	1.308.412	1.949.322	235.752	454.260	690.012	36,78%	34,72%
2000	665.304	1.332.365	1.997.669	263.508	437.888	701.396	39,61%	32,87%
2001	731.113	1.539.757	2.270.870	277.053	538.932	815.985	37,89%	35,00%
2002	796.099	1.787.861	2.583.960	329.186	739.280	1.068.466	41,35%	41,35%

3.4. KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN – SETJEN DPR